

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, 2006, Pasal 1 ayat 2). Jalan merupakan fasilitas umum yang hampir setiap orang memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu kondisi jalan sangatlah penting untuk dijaga sebaik mungkin. Salah satu upaya dalam menjaga kondisi jalan tersebut adalah melaksanakan pemeliharaan terhadap ruas jalan yang ada.

Dalam melaksanakan pemeliharaan jalan, PP No 14 Tahun 1987 tentang “Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah” telah menyerahkan wewenang tersebut kepada daerah. Dengan adanya penyerahan urusan tersebut, pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan berbagai usaha dalam mencapai target daerah. Salah satunya adalah menentukan prioritas pemeliharaan jalan secara efektif dan efisien. Kota Payakumbuh dengan luas daerah lebih kurang 80,43 km² memiliki panjang ruas kota sepanjang 254,678 km yang tersebar di 5 (lima) kecamatan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, penanganan jalan dilakukan terhadap jalan Kota sepanjang 254,678 km. Dalam RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017 s.d 2022 ditetapkan target kondisi jalan Kota Payakumbuh telah mencapai nilai kondisi mantap sebesar 80%. Dan untuk mewujudkan target RPJMD tersebut, instansi pengelolaan jalan daerah harus memiliki rencana strategis agar target dapat dicapai dengan baik. Adapun beberapa program yang dicanangkan yaitu : pemeliharaan, pembangunan,

peningkatan, serta rehabilitasi jalan. Untuk mencapai target RPJMD tersebut, sangat diperlukan suatu cara penentuan prioritas penanganan jalan yang tepat agar target RPJMD dapat dicapai.

Perencanaan penanganan jalan yang baik merupakan unsur yang penting dalam perencanaan pengelolaan jalan. Mayoritas penetapan penanganan pemeliharaan jalan hanya berdasarkan pendapat awam yang belum memperhitungkan tingkat kebutuhan sebenarnya terhadap kondisi jalan yang ada. Sementara seharusnya dibutuhkan suatu rencana prioritas pemeliharaan yang baik agar kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan efektif.

Dalam PP 34 Tahun 2006 juga dijelaskan tentang penyelenggara jalan, dimana penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. Adapun kegiatan pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan daerah tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Dalam hal penyelenggaraan jalan daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Bina Marga. Dalam pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 disebutkan butir-butir tentang pemeliharaan jalan, yakni :

- Pasal 1 :Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan jalan sesuai dengan kewenangannya,
- Pasal 2 :Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan,
- Pasal 3 :Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemeliharaan ruti, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi,
- Pasal 4 :Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan **rencana pemeliharaan jalan**.

Sangat jelas diterangkan dalam peraturan pemerintah mengenai pemeliharaan jalan. Namun ada kendala utama yang sering dijadikan

alasan kenapa banyaknya jaringan jalan yang tidak terpelihara atau tidak berada dalam kondisi baik. Keterbatasan anggaran daerah sering kali menjadi alasan utama keterbatasan dalam kegiatan pemeliharaan jalan. Keterbatasan anggaran pada suatu daerah untuk pemeliharaan suatu aset daerah memang sering terjadi. Oleh karena itu untuk memanfaatkan keterbatasan biaya tersebut dengan efektif, dibutuhkan sebuah rencana prioritas pemeliharaan jalan yang baik.

Menurut Dian Hendra dalam tesis nya tentang “Pengelolaan Database Dalam Pengambilan Kebijakan Pemeliharaan Jalan”, diperlukan suatu pengelolaan database untuk menunjang penyusunan program jalan, menganalisis data teknis sehingga menghasilkan data tingkat kerusakan jalan beserta perkiraan biaya pemeliharaan jalan. Peraturan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengeluarkan suatu kebijakan SK.77/KPTS/Dd/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten, maka rujukan mengenai pemeliharaan jalan daerah seharusnya sudah diterapkan di setiap daerah dan tidak lagi berdasarkan hanya pada taksiran kasar yang belum memperhitungkan kondisi jalan yang ada serta biaya pemeliharaan terdahulu.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Suyasa (2007), yang bertujuan untuk menentukan skala prioritas penanganan jalan kabupaten di Kabupaten Bandung, ada 5 faktor kriteria yang digunakan, yaitu kondisi jalan, mobilisasi, volume lalu lintas, tingkat aksesibilitas dan pengembangan wilayah. Sementara itu menurut Jany (2008) dalam tesis Penentuan Prioritas Penanganan Jalan di Kecamatan Mandonga Kota Kendari, kriteria penilaian yang digunakan meliputi pemerataan aksesibilitas, pengembangan wilayah, aspek biaya, dampak lingkungan dan kerusakan jalan.

Berdasarkan opini-opini dan permasalahan mengenai ketidakjelasan dasar prioritas pemeliharaan jalan yang efektif, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap cara penentuan prioritas penanganan pemeliharaan jalan. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan

judul “Penentuan Prioritas Pemeliharaan Jalan - Studi Kasus Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada butir 1.1 sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan dua keadaan utama dalam perumusan masalah pada penulisan tesis ini. Perumusan masalah yang coba penulis kemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tidak adanya rencana prioritas dalam kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Payakumbuh mempengaruhi target capaian kondisi jalan mantap di Kota Payakumbuh Sumatera Barat, oleh karena itu dibutuhkan sebuah rencana prioritas dalam pemeliharaan jalan agar kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan meningkatkan kondisi jalan mantap,
2. Belum terlaksananya pedoman penentuan jenis pemeliharaan jalan yang sesuai dengan aturan atau standar kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Payakumbuh, sehingga rata-rata kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Payakumbuh dapat dikatakan boros anggaran. Maksudnya dalam pemilihan jenis pemeliharaan haruslah ada sebuah panduan tetap dalam menentukan jenis pemeliharaan minimal terhadap sebuah jalan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.



1.3 Tujuan dan Masalah Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- Mengidentifikasi kriteria-kriteria prioritas dalam kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Payakumbuh dan urutan prioritas kriteria pemeliharaan jalan tersebut berdasarkan hasil jawaban responden,
- Menggunakan cara penentuan jenis pemeliharaan minimal untuk jalan kota berdasarkan peraturan atau pedoman yang telah dikeluarkan oleh kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat melalui Dirjen Pembinaan Jalan Kota agar pemeliharaan jalan di Kota Payakumbuh tidak boros anggaran dan efisien sesuai aturan yang ada,

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai informasi yang dapat digunakan oleh *stake holder* dalam menentukan prioritas pemeliharaan jalan yang tepat sasaran,
2. Sebagai acuan bagi pemerintah Kota Payakumbuh dalam menentukan jenis penanganan pemeliharaan jalan yang sesuai dengan pedoman yang ada.

1.4 Batasan Penelitian

Rencana prioritas yang ditinjau dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menentukan urutan prioritas pemeliharaan jalan yang efektif berdasarkan hasil jawaban kuisioner dan bagaimana jenis pemeliharaan jalan yang sesuai dengan kondisi serta rujukan peraturan pemerintah yang ada. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuisioner dan survey kondisi jalan. Sementara itu data sekunder didapatkan dari RPJMD Dinas PUPR Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, database kondisi jalan (DD-1) kota Payakumbuh, dan buku profil Dinas PUPR yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Kota Payakumbuh tahun 2016.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk penulisan yang terarah, maka alur penulisan dalam tesis ini akan dibagi dala 5 (lima) bab dengan penjabaran sebagai berikut :

- **Bab 1. PENDAHULUAN**

Merupakan pembahasan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

- **Bab 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Adalah penjabaran tentang dasar-dasar teori yang berkaitan dengan topik pembahasan tesis ini.

- **Bab 3. METODOLOGI PENELITIAN**

Tahapan tentang metodologi pembuatan tesis, disertai pembahasan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan tujuan penyusunan tesis.

- **Bab 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang hasil kerja atau penelitian dan pembahasan hal-hal yang didapatkan dalam penulisan penelitian.

- **Bab 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran penulis tentang kesempurnaan penelitian berikutnya.

- **Daftar Pustaka**

- **Lampiran**

